

ABSTRAK

Di Kecamatan Tenggarong Seberang terdapat banyak usaha pertambangan. Status IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah operasi produksi, pascatambang dan masih dalam proses pengurusan perizinan. Menurut UU nomor 4 tahun 2009 Pasal 95 diantaranya disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Permasalahan muncul apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayah kecamatan Tenggarong Seberang. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK.

Untuk memecahkan masalah penambangan (eksploitasi) sumber daya minerba (mineral batubara) dapat terus dilakukan dengan kewajiban upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sesuai dengan kapasitas/daya dukung lingkungan wilayah tersebut. Berdasarkan RTRW sebagian kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung resapan air tanah, kawasan lindung mata air, kawasan lindung rawan longsor, kawasan hutan konservasi. Oleh karena itu alokasi perencanaan kawasan pertambangan Kecamatan Tenggarong tidak tumpang tindih dengan pertumbuhan kawasan yang telah ada.

Penelitian ini membahas seberapa besar pengaruh kegiatan penambangan terhadap eksploitasi sumberdaya minerba dan daya dukung lingkungan. Pada kecamatan Tenggarong seberang terdapat sumberdaya alam namun daya dukung lingkungan khususnya lingkungan fisik untuk kegiatan penambangan belum dikaji. Metode penelitian meliputi penelitian lapangan untuk mengevaluasi keserasian antara kegiatan penambangan yang dilakukan dengan daya dukung fisik. Untuk mencapai keserasian tersebut, perlu dilakukan evaluasi kemampuan daya dukung lingkungan fisik. Pekerjaan reklamasi memerlukan kajian daya dukung lingkungan. Manfaat penelitian adalah mengetahui bagaimana daya dukung lingkungan pada kegiatan penambangan minerba mempengaruhi tingkat keberhasilan reklamasi.

ABSTRACT

In District Tenggara Seberang there are many mining operations. Status of IUP (Izin Usaha Pertambangan) is a production operation, post-mining and is still in process management of permissions. According to UU nomor 4 tahun 2009 Pasal 95 of them mentioned that IUP and IUPK mining techniques are required to apply the rules and comply with environmental capacity limits of tolerance. Problems arise when the carrying capacity of the environmental conditions of the region can not bear the burden of production operation of mineral resources and / or coal carried in Tenggara Seberang districts. Temporary suspension of mining activities can be provided to holders of IUP and IUPK.

To solve the problem of mining exploitation Mining resources can be maintained with the obligation to curb environmental damage according to the capacity / environmental support area. Based on some of the region's spatial plan has been designated as a protected area groundwater recharge, springs protected areas, protected areas prone to landslides, forest conservation. Therefore, the allocation of mining area planning in District Tenggara Seberang not overlap with existing regional growth.

This study discusses the effect of mining activities on resource exploitation and carrying capacity. In districts Tenggara Seberang there are natural resources but are carrying capacity of the particular physical environment for mining activities have not been studied. Research methods include studies to evaluate the compatibility between mining activities carried out by the physical carrying capacity. To achieve harmony, it is necessary to evaluate the ability of the carrying capacity of the physical environment. Reclamation work requires environmental capacity assessment. Benefits of the research is the carrying capacity of the environment in mining activities affects the success of reclamation.